



# KARYA ILMIAH

## SMA KOLESE DE BRITTO



### DAMPAK INFRASTRUKTUR TERHADAP PETANI

Reinard Yuvens Ansgari Leonardo <sup>a,1\*</sup>, Dionisius Bagas Putra <sup>b,2</sup>, Putra Adriel Alexandro <sup>c,3</sup>, YB. Aprin Sugeng Jatmika, S.Pd.

<sup>a</sup> SMA Kolese De Britto, Sleman, Indonesia

<sup>1</sup>reinardyuvens767@gmail.com\*; dionisiusbagasputra@gmail.com; putadr15@gmail.com

\*korespondensi penulis

---

#### Informasi artikel

##### Kata kunci:

Infrastruktur  
Pertumbuhan Ekonomi  
Pertanian  
Sektor Pertanian  
Faktor Produksi Pertanian

#### ABSTRAK

Konsep pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang mewakili nilai total output suatu negara selama periode tertentu. Di sisi lain, infrastruktur mencakup struktur fisik dan institusi yang mendukung upaya perekonomian dan berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini mencakup sistem transportasi (seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara), sumber energi (seperti listrik, gas, dan air), telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Pertanian, di sisi lain, melibatkan budidaya tanaman, peternakan, dan kegiatan terkait lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan makanan, serat, bahan bakar, dan berbagai bahan penting lainnya. Sebagai sektor ekonomi yang penting, pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan bahan mentah umat manusia. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, termasuk menyediakan lapangan kerja, pangan, dan sumbangan devisa melalui ekspor. Dengan kuatnya sektor pertanian maka dapat terjalin hubungan yang erat dengan sektor perekonomian lainnya. Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Faktor-faktor produksi tersebut dinamakan faktor masukan produksi dan pengorbanan produksi. Faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya hasil yang diperoleh. Pemanfaatan faktor produksi secara optimal pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut seefisien mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal.

---

#### ABSTRACT

##### Keywords:

Infrastructure  
Economic Growth  
Agriculture  
Agricultural Sector  
Agricultural Production Factors

The concept of economic growth involves an increase in the production of goods and services over a period of time. This growth can be measured using indicators such as Gross Domestic Product (GDP), which represents the total value of a country's output over a given period. Infrastructure, on the other hand, includes the physical structures and institutions that support economic endeavors and contribute to people's daily lives. This includes transportation systems (such as roads, bridges, ports and airports), energy sources (such as electricity, gas and water), telecommunications, clean water, sanitation and other public facilities. Agriculture, on the other hand, involves the cultivation of crops, animal husbandry, and other related activities aimed at producing food, fiber, fuel, and various other essential materials. As an important economic sector, agriculture plays a vital role in meeting the food and raw material needs of mankind. The agricultural sector plays an important role in developing Indonesia's economy, including providing

employment, food, and foreign exchange contributions through exports. With a strong agricultural sector, there can be a close relationship with other economic sectors. The agricultural subsector includes food crops, plantations, livestock, forestry and fisheries. The factors of production are called production input factors and production sacrifices. Production factors determine the size of the results obtained. Optimal utilization of production factors in principle is how to utilize these production factors as efficiently as possible to produce maximum output.

© 2023 (Reinard Yuvens Ansgari Leonardo).

All Right Reserved

## **Pendahuluan**

Pembangunan infrastruktur yang pesat di suatu negara seringkali dianggap sebagai indikator kemajuan, menciptakan peluang ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Namun perkembangan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat pedesaan seperti petani. Infrastruktur seperti jalan raya, pabrik dan pembangunan lainnya seringkali mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi petani yang mengandalkan lahan pertanian untuk penghidupan mereka.

Kawasan pedesaan menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan dianggap sebagai kawasan yang membutuhkan peningkatan kualitas hidup. Namun pertumbuhan infrastruktur seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani. Hilangnya lahan pertanian, perubahan penggunaan lahan, dan terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur di perkotaan dapat mengakibatkan terbatasnya akses petani terhadap fasilitas dan pasar, sehingga menghambat potensi pengembangan ekonomi dan peluang usaha mereka.

Namun perkembangan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat pedesaan seperti petani. Infrastruktur seperti jalan raya, pabrik dan pembangunan lainnya seringkali mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi petani yang mengandalkan lahan pertanian untuk penghidupan mereka.

Kawasan pedesaan menjadi fokus pembangunan infrastruktur dan dianggap sebagai kawasan yang membutuhkan peningkatan

kualitas hidup. Namun pertumbuhan infrastruktur seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani. Hilangnya lahan pertanian, perubahan penggunaan lahan, dan terkonsentrasinya pembangunan infrastruktur di perkotaan dapat mengakibatkan terbatasnya akses petani terhadap fasilitas dan pasar, sehingga menghambat potensi pengembangan ekonomi dan peluang usaha mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan lahan terhadap petani, menilai dampak emosional dan sosial, serta menilai dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lahan pertanian.

## **Kajian Literatur**

Karya ilmiah ini mengulas beberapa teori penting pertumbuhan ekonomi. Pertama, teori pertumbuhan klasik yang dipelopori oleh Adam Smith menekankan peran sistem pasar bebas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien. Faktor-faktor seperti perluasan pasar, spesialisasi dan kemajuan teknologi dianggap sebagai kunci untuk mencapai pertumbuhan yang stabil. Namun, ekonom klasik seperti Malthus dan Ricardo percaya bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan kembali ke tingkat subsisten dan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, termasuk tingkat populasi dan teknologi. Kedua, teori Schumpeter menekankan peran wirausaha dalam pertumbuhan ekonomi melalui inovasi. Pengusaha mengambil risiko dengan meminjam uang dan berinvestasi pada inovasi yang merangsang pertumbuhan ekonomi, memicu peningkatan pendapatan dan konsumsi, serta mendorong perusahaan lain untuk meningkatkan produksi dan investasi. Ketiga, Teori Pertumbuhan Neo Klasik, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, menekankan peran faktor produksi, khususnya kemajuan teknologi

dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis Solow memberikan dukungan matematis untuk teori ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memainkan peran kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

### Metode

Karya ilmiah ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian dilakukan di Desa Ketingan Tirtoadi Mlati untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan tol. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan pencatatan. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara kepada petani terdampak, sedangkan data sekunder didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan. Melakukan analisis data dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan validasi.

Temuan menunjukkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat pertanian, khususnya terkait dengan pembelian sawah oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kesimpulan yang diperoleh dari data observasi dan wawancara menunjukkan dengan jelas dampak pembangunan jalan tol terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap dampak pembangunan infrastruktur di Desa Ketingan Tirtoadi Mlati.

### Hasil dan pembahasan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lahan pertanian yang dibeli pemerintah untuk pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif untuk mempermudah akses masyarakat ke Jogja-Solo-Bandara YIA. Ini terkait dengan kemajuan akses transportasi di Yogyakarta sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya, yang berhubungan dengan kemajuan teknologi.

Di sisi lain, pertumbuhan produksi yang sangat bergantung pada lahan menyebabkan petani tidak dapat bekerja dan menjual hasil panen mereka lagi. Akibatnya, output pertanian akan terus berkurang jika lahan pertanian dikonversi untuk tujuan lain.

Harga lahan sawah yang dibeli oleh pemerintah untuk pembangunan jalan tol, juga

tidak memberikan keuntungan bagi para petani untuk membeli tanah sawah kembali yang dimana seharusnya dilakukan usulan perencanaan yang disebarkan kepada masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan tanggapan saran. Tanggapan dari masyarakat yang sudah didapatkan akan digunakan untuk pertimbangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan UU No.14 tahun 2020.

Bapak Endar, Ibu Dukuh, dan Bapak Taryono merasa sedih karena mereka kehilangan mata pencaharian mereka dan barang-barang material dan nonmaterial. Bapak Endar merasa sedih karena barang-barang materialnya hilang karena harga lahan sawah yang dibeli pemerintah tidak menguntungkan dan membuat rugi karena uang tidak mencukupi untuk membeli lahan sawah di tempat lain karena harganya telah meningkat.

Faktor non material juga dirasakan bapak Endar yaitu harus kehilangan harta peninggalan dari orang tuanya yang sangat berarti bagi beliau karena jika tanah itu masih ada, maka bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, tanah tersebut juga dapat diwariskan ke anaknya sampai cucunya.

Hal lain juga dirasakan dengan perbedaan harga tanah yang diperoleh bapak Endar juga tidak memuaskan dikarenakan jumlah uang yang diterima senilai 267 juta dari pemerintah dengan kerugian pekarangan sawah beserta isi sawahnya sedangkan harga lahan sawah yang seharusnya bisa dijual bisa mendapatkan uang diatas 300 jt. Berkaitan dengan penggantian ini menyesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2012 pasal 33 yang dimana tertulis Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah, b. ruang atas tanah dan bawah tanah, c. bangunan, d. tanaman, e. benda yang berkaitan dengan tanah dan f. kerugian lain yang dapat dinilai dan pasal 35 yaitu Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

Bapak Endar dan warga lainnya juga tidak ada yang berani bertindak untuk melakukan aksi protes kepada pemerintah untuk meminta harga tanah yang dibeli dinaikan karena takut uang yang akan diterima nanti berkurang dan nanti



akan semakin sulit urusannya jika dibawa ke pengadilan. Dalam hal ini UU No. 2 Tahun 2012 memiliki hak untuk masyarakat dalam mengajukan musyawarah kesepakatan ganti rugi sesuai dengan pasal 37 yaitu:

1. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

2. Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Serta pasal 38:

1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

2. Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

3. Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

5. Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Sedangkan ibu Lurah juga merasa sedih karena harus kehilangan mata pencaharian dan juga kehilangan perasaan bertani yang menyenangkan. Dimana beliau sudah tidak bisa merasakan kesenangan bertani dengan warga lainnya dan sekarang sebagian warganya sudah kembali ke kampungnya dan bekerja disana, sebagian warga lainnya juga mencari pekerjaan ditempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, bapak Taryono juga merasa sedih karena harus kehilangan mata pencaharian utamanya yaitu bertani. Namun, disisi lain beliau juga merasa senang karena mendapatkan uang hasil ganti rugi pembelian lahan sawah oleh pemerintah. Walaupun hasil yang didapat tidak terlalu menguntungkan, tetapi beliau masih mendapatkan harga lahan sawah ditempat lain sesuai dengan keuntungan ganti rugi.

Dampak negatif juga dirasakan para warga di desa Ketingan Tirtoadi Sleman. Dimana desa tersebut mengalami tingkat polusi udara akibat pembangunan jalan tol, yang mana angkutan alat berat melewati jalanan umum membuat jalanan rusak dan mengeluarkan debu dari serpihan-serpihan. Selain itu, kendaraan yang melewati jalan tol akan mengeluarkan emisi gas dari kendaraan yang membuat polusi udara meningkat. Hal itu harus dipikirkan pemerintah untuk menangani daerah pemukiman agar tidak terkena polusi udara jalan tol.

Faktor lain juga dirasakan warga akan kesulitan mencari sumber penghasilan. Dimana sebelumnya sumber penghasilan petani dari lahan sawah yang mereka punya untuk sumber kehidupan. Namun, sekarang lahan pertanian itu dibeli pemerintah dan membuat mereka tidak ada sumber penghasilan kecuali memenuhi kehidupan dari uang hasil lahan yang dibeli pemerintah.

Ketersediaan air yang berkurang dan kualitas air yang menurun dapat terjadi ketika pembangunan jalan tol. Dimana sebelumnya air tersebut dapat mengalir dengan lancar tetapi dengan dibangunnya jalan tol menjadi sedikit lebih sulit untuk mendapatkan air. Selain itu, air juga sedikit tercemar akibat bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol.

Pembahasan (diskusi) terkait dengan pendapat dan teori mutakhir yang berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang diperoleh. Pembahasan dalam artikel disusun untuk untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian; (2) menunjukkan temuan-temuan yang diperoleh; (3) menginterpretasikan/ menafsirkan temuan-temuan yang diperoleh; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

Untuk memperjelas atau meningkatkan penggunaan kata agar lebih efektif, hasil dan pembahasan dapat diperkuat dengan tabel, grafik, gambar, ilustrasi. Setiap, tabel, gambar, grafik, atau ilustrasi diberikan nomor dan harus dirujuk dalam artikel.

### Simpulan

Ketika lahan pertanian diubah menjadi lahan non-pertanian untuk tujuan pembangunan infrastruktur, para petani tidak hanya menderita kerugian materi namun juga mengalami tekanan emosional karena lahan mereka dirampas, yang sangat terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Diakui secara luas bahwa pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap polusi udara, mempersulit petani dalam mencari sumber pendapatan alternatif, dan mengurangi ketersediaan dan kualitas air. Meskipun pemerintah menyesuaikan harga tanah yang dibebaskan untuk memberikan kompensasi, penting untuk mempertimbangkan permintaan pemilik tanah. Solusi yang diusulkan antara lain menerapkan kebijakan penanaman pohon di sepanjang jalan tol untuk mitigasi polusi udara, memberikan bimbingan dan dukungan kepada petani yang kehilangan mata pencaharian, dan memberikan penekanan signifikan pada kompensasi berbagai aspek seperti lahan, baik di atas maupun di bawah tanah. bangunan, tanaman, dan benda terkait lainnya. Pentingnya musyawarah kesepakatan ganti rugi juga ditekankan, dengan memberikan edukasi kepada warga dan pelayanan melalui universitas jurusan hukum untuk memastikan bahwa proses ini berjalan transparan, adil, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkena dampak.

### Ucapan terima kasih

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ilmiah ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan keteguhan selama proses penulisan. Penghargaan juga disampaikan kepada Bapak FX. Catur Supatmono sebagai kepala sekolah dan kepada wali kelas Drs. B. Widi Nugroho, M.Ed., Y. Hendrabudi Prabawa, S.Pd., dan Y. Sumardiyanto, S.Pd. Kami juga berterima kasih kepada koordinator penulisan, Thomas Dannar Sulistyono, S.Pd., M.Sc., serta pembimbing penulisan, Bapak YB. Aprin Sugeng Jatmika, para narasumber, Bapak Endar, Ibu Dukuh dan

Bapak Taryono Dukungan, dan warga desa Ketingan Tirtoadi Sleman. Dukungan dan kerjasama teman-teman penulis sangat berarti, demikian juga dengan doa dan dukungan dari orang tua kami. Meskipun menyadari adanya kekurangan, kami menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang telah diberikan.

### Referensi

PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, vol. -, no. -, -, p. 43. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012, <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%202%20Thn%202012.pdf>.

Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur.” Akibat Hukum Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pembangunan Infrastruktur, vol. -, no. 2022, 24 September 2022, p. 1. ojs.rewangrencang, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/309#:~:text=Hal%20itu%20menimbulkan%20pertanyaan%20tentang,sesuai%20dengan%20ketentuan%20dalam%20peraturan>

Marudin, Lumaya Santi. “DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL.” DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO - KERTOSONO TERHADAP PENGHIDUPAN PETANI, vol. -, no. 2014, 2014, p. 81. LUMAYA, <https://repository.stpn.ac.id/1256/1/LUMAYA.pdf>

Kamuntuan, Deivi, et al. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI.” PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MELALUI PROGRAM GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA ADOW KECAMATAN PINOLOSAN TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, vol. -, no. -, -, p. 13. -, -.

H.F, Beny Nabila, et al. “LAHAN PERTANIAN.” LAHAN PERTANIAN DI JOGJA MENIPIS, BELI LAHAN JADI SOLUSI STRATEGIS?, vol. -, no. 2022, 2022, p. 1. kmsep.faperta.ugm, <https://kmsep.faperta.ugm.ac.id/2022/09/20/lahan-pertanian-di-jogja-menipis-beli-lahan-jadi-solusi-strategis/>.

unsil. “BAB III KAJIAN TEORI.” BAB II KAJIAN TEORI, vol. -, no. -, -, p. 29. repositori.unsil, <http://repositori.unsil.ac.id/8651/12/BAB%202.pdf>

unsil. “BAB III KAJIAN TEORI.” BAB II KAJIAN TEORI, vol. -, no. -, -, p. 29. repositori.unsil, <http://repositori.unsil.ac.id/8651/12/BAB%202.pdf>

